

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Malaadministrasi Dana Desa Terus Berkurang
Entitas / Cakupan	: Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.16
Edisi	: Senin, 21 Mei 2018

Malaadministrasi Dana Desa Terus Berkurang

BANDUNG, (PR).-

Gencar melakukan sosialisasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat mencatat masalah malaadministrasi di dalam pengelolaan dana desa turun tajam. Hal tersebut seiring dengan semakin dipahaminya peraturan mengenai penggunaan dana desa oleh aparat desa.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid tak menampik pada tahun-tahun pertama ditemukan sejumlah pelanggaran di dalam penggunaan dana desa. Beberapa di antaranya kemudian berlanjut dan diproses secara hukum.

Meskipun tak menyebutkan secara detail pelanggaran yang diproses tersebut, Yuniar menekankan munculnya pelanggaran penggunaan dana desa tersebut karena ketidaktahuan dan masih belum pahamnya aparat desa mengenai peraturan yang ada. Di sisi lain, pihaknya pun belum memiliki mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang efektif.

"Mulai 2017 dana desa lewat KPPN, sehingga ketika mereka menyalurkan dana, pemda harus menyampaikan bukti dan laporan mengenai Perda APBD, Perda APBDes, dan evaluasi perencanaan *output*, itu yang membuat pemda dan desa lebih hati-hati. Di sisi

lain, juga dilakukan sosialisasi dan pendampingan agar aparat desa tidak lagi tersangkut pada masalah malaadministrasi," katanya saat penyerahan Treasury Award, di Bandung, akhir pekan lalu. Kegiatan dibuka Plh Gubernur Jawa Barat Iwa Karniwa dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryo.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Didik Choirul mengatakan, pada tahap pertama penyaluran dana desa seluruhnya telah disalurkan ke setiap kabupaten di Indonesia. Dana tersebut tinggal disalurkan dari pemerintah kabupaten ke masing-masing desa.

Didik menuturkan, mekanisme yang diberlakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana desa. Akan tetapi, masih ada hambatan di tingkat pemerintah kabupaten dan pemerintah desa karena aspek kehati-hatian dalam penggunaan serta pengaliran dana desa.

"Pemerintah kabupaten pun perlu waktu sedikit lebih banyak untuk melakukan verifikasi terhadap penggunaan dana desa di setiap desa," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan, di sisi be-

lanja negara pada alokasi APBN tahun 2018 terdapat kebijakan pengalihan dari semula belanja konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara.

Alokasi belanja pemerintah pusat untuk Provinsi Jabar sebesar Rp 51,9 triliun dengan realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2018 sebesar Rp 12,6 triliun (24,34%). Sementara besaran penerimaan negara dari pajak dan non-pajak sampai dengan saat ini telah tercapai sebesar Rp 30,99 triliun.

Treasury Award

Lebih lanjut, sebagai bukti komitmen menjadi katalisator tata kelola pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Jabar, Kanwil DJPBN Jabar kembali menganugerahkan Treasury Award kepada satuan kerja, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terbaik wilayah ini. Yuniar mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk mendorong percepatan perwujudan *good governance* pada lembaga pelayanan publik penerima dana APBN di Jabar.

Selain itu, sebagai kegiatan apresiasi kepada satuan kerja, pemerintah daerah, dan pemerintah desa sebagai penerima serta pengguna dana APBN dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang telah berkomitmen mem-